

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aribowo, I., & Setiawan, B. (2019). *Penagihan Pajak*. Jakarta: Edu Pustaka.
- Fitriandi, P., Liyana, N. F., & Riyanto, E. (2019). *Praktikum Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Hadi, M. (1998). *Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah* (edisi ke-2., cetakan ke-3). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Pangastuti, P., Harilama, M. A., Hutasoit, J. E. P. (2022). *Kecamatan Palmerah dalam Angka*. Jakarta: BPS Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saidi, M. D. (2008). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Seligmann, R.A. Edwin., (1925). *Essays in Taxation*. New York, Amerika Serikat: Macmillan.
- Siahaan, M. P. (2004). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Smith, Adam. (2002). *The Wealth of Nations*. London, Inggris: W. Strahan dan T. Cadell
- Sri Pudyatmoko, Y. (2006). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.

Utara, A.S. (2011). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.

Zuraida, I., & Advianto, L. Y. H. S. (2011). *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Zuraida, Ida. (2010). *Penagihan dan Sengketa Pajak*. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *Jurnal InFestasi*, 13(1), 275-284.
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3049>

Harris, Fikri., & Sulfan. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 310-326.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1839>

Imron Rizki, A. (2018). Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*, 11(2), 81-88.
<https://core.ac.uk/download/pdf/231140755.pdf>

Iscabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan*

Portofolio, 2(2), 1-13.
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/JAPP/article/view/5586>

Kardianti, E., Hidayat, M., & Pratiwi, T. S. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(2), 85-89.
<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/306>

KBBI. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi *online/daring*. Kemendikbud.

Kementerian Keuangan. (2021). *APBN dan Nota Keuangan 2022*.
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan> , diakses pada 19 November 2022.

Kinasih, S. A., & Pradana, H. A. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Reward pada Kontribusi Berbagi Pengetahuan dengan Praktik Berbagi Pengetahuan sebagai Variabel Pemediasi di SMK Negeri 2 Depok Yogyakarta. *Jurnal Manajemen dan Sains*, 7(1), 212-223.
<http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v7i1.371>

Muhammad, Arfaningsih., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37-45.
<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/2220/pdf>

- Suryadi, Tri Langgeng., & Subardjo, Anang. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1-22.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2370/2374>
- Tita, H. M. Y. (2016). Surat Paksa dalam Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. *Perspektif Hukum*, 16(1), 45-59.
<https://doi.org/10.30649/ph.v16i1.42>
- Wahdi, N., Wijayanti, R., Danang. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106-119.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/1242/0>
- Walewangko, T. L. U. (2016). Analisis Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon. *Jurnal Emba*, 4(1), 799-806.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11806>
- Wirawan, A. S. (2021). Tinjauan Tinjauan Atas Pelaksanaan Penagihan Aktif Berupa Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. *Karya Tulis Tugas Akhir*.

Zhavira, F. (2021). Tinjauan Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Sebagai Upaya Penagihan Pajak di KPP Pratama Aceh Besar. *Karya Tulis Tugas Akhir*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak